

**ANALISI PENGARUH BELANJA MODAL DAERAH,
INVESTASI, DAN INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA (IPM) TERHADAP KEMISKINAN DI
INDONESIA TAHUN 2009-2013
(STUDI KASUS PADA 33 PROVINSI)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Helmi Winda Wati
115020113111002**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISI PENGARUH BELANJA MODAL DAERAH, INVESTASI, DAN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP KEMISKINAN
DI INDONESIA TAHUN 2009-2013
(STUDI KASUS PADA 33 PROVINSI)**

Yang disusun oleh :

Nama : Helmi Winda Wati
NIM : 115020113111002
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 25 mei 2015.

Malang, 25 Mei 2015

Dosen Pembimbing,



Dr. Susilo, SE., ME.

NIP. 19601030 198601 1 001

**Analisis Pengaruh Belanja Modal Daerah, Investasi, dan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia
Pada Tahun 2009-2013 (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)**

Helmi Winda Wati

Dr. Susilo, SE., ME.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: wiendha48@yahoo.com

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang terus ditemui dan tidak kunjung terselesaikan baik dinegara berkembang maupun di negara maju sekalipun. Dengan alternatif variabel yang dipilih, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Belanja Modal Daerah, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia selama tahun 2009-2013 pada 33 provinsi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Sedangkan Investasi dan IPM masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Kata kunci : Kemiskinan, Belanja Modal Daerah, Investasi, Indeks Pembangunan Manusia..

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan salah satu isu sentral yang sering kali muncul dalam setiap kehidupan manusia. Penyakit kemiskinan tidak jarang sering dihadapi baik oleh Negara berkembang maupun negara maju di dunia. Pada zaman modern ini, kemiskinan tidak hanya dipandang dari sisi materil saja, melainkan mampu merambat pada sisi sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, bahkan agama. Oleh karena itu seluruh negara di dunia ini tidak bisa terlepas oleh kemiskinan dengan berbagai jenis miskin yang dihadapinya.

Adanya penurunan tingkat kemiskinan pada wilayah tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah membawa sebuah keberhasilan. Pembangunan ekonomi dapat diukur dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari perkembangan PDB. Pertumbuhan PDB memiliki hubungan dengan kemiskinan baik secara agregat maupun disektor-sektor ekonomi secara individu. Dibawah ini adalah data perkembangan PDB perkapita Indonesia dilihat atas dasar harga berlaku maupun harga konstan.

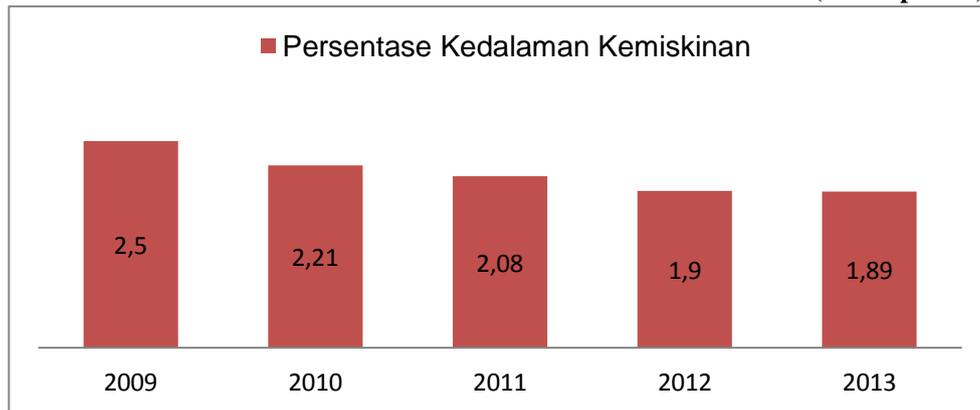
Tabel 1. Pertumbuhan Produk Bruto (PDB) perkapita Indonesia tahun 2009-2013

No.	PDB Per kapita	Tahun (Juta Rupiah)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	23,8	27,02	30,6	33,5	36,5
2.	Atas Dasar Harga Konstan 2000	9,2	9,7	10,1	10,6	11,1

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2015.

Data yang diambil dari Badan Pusat Statistik diatas mendeskripsikan bahwa pertumbuhan PDB perkapita Indonesia selama lima tahun terakhir (2009-2013) mengalami kenaikan baik dilihat atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Menurut World Bank (2014), dalam jangka waktu lima tahun terakhir ini (tahun 2009 sampai tahun 2013) pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,9% pertahun atau mengalami kondisi pertumbuhan ekonomi tertinggi setelah mengalami krisis selama 15 tahun. Adanya peningkatan pertumbuhan tersebut merupakan hal yang membanggakan bagi pemerintah karena disisi lain tingkat kemiskinan Indonesia juga menurun dalam lima tahun terakhir ini. Tingkat kemiskinan tersebut bisa dilihat berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) dibawah ini.

Gambar 1. Indeks Kedalaman Kemiskinan Indonesia tahun 2009-2013 (dalam persen)

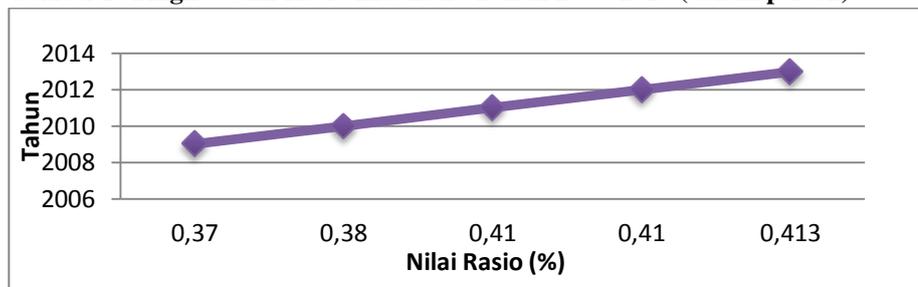


Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2015. (Data diolah oleh penulis)

Data diatas mendeskripsikan bahwa kemiskinan di Indonesia selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Menurunnya kemiskinan di Indonesia dikarenakan banyaknya pelaksanaan pembangunan pemerintah melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan. Hal ini membuktikan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah mampu menurunkan kemiskinan. Meskipun demikian, kenaikan pertumbuhan PDB riil perkapita dan penurunan indeks kedalaman kemiskinan masih tetap tidak diikuti dengan rendahnya ketimpangan ekonomi di Indonesia.

Salah satu cara untuk mengukur ketimpangan ekonomi yaitu dengan menggunakan koefisien gini atau gini rasio. Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Dibawah ini adalah data Koefisien gini atau Gini rasio yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) :

Gambar 2. Tingkat Gini Rasio Indonesia Tahun 2009-2013 (dalam persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2015. (Data diolah oleh penulis)

Data diatas menggambarkan adanya kenaikan Gini rasio dari tahun 2009-2013. Kondisi kenaikan tingkat gini rasio selama lima tahun terakhir ini menjelaskan bahwa penyakit kemiskinan yang terjadi di Indonesia sangat berbanding terbalik dengan data penurunan tingkat kedalaman kemiskinannya sendiri. Secara kasat mata, ternyata masih banyak permasalahan ekonomi yang terjadi pada masyarakat di Indonesia.

Dalam kenyataannya, kenaikan pertumbuhan ekonomi dan menurunnya kemiskinan di Indonesia tidak diikuti dengan adanya pemerataan ekonomi yang ideal. Banyak penduduk Indonesia yang masih hidup di atas garis kemiskinan dan rentan jatuh miskin kembali. Pada tahun 2013, sekitar 28 juta penduduk hidup di bawah Rp 293.000 per bulan sedangkan 68 juta penduduk hidup sedikit di atas angka tersebut, selain itu pengeluaran rata-rata keluarga miskin empat orang sebesar Rp.1.080.000 yang meliputi 67% untuk makanan, 28% untuk perumahan dan kebutuhan hidup lain, serta 5% untuk pendidikan dan kesehatan (Sumber : <http://www.worldbank.org>).

Pengeluaran rata-rata keluarga yang seperti diatas tentu saja berakibat kepada pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka menjadi rendah sehingga kemiskinan keluarga tersebut terwarisi pada generasi berikutnya. Gambaran ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir orang tertentu saja sehingga dapat menyebabkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin tidak mengalami mobilitas sosial. Oleh karena itu, secara sadar permasalahan kemiskinan di Indonesia sebenarnya masih belum terselesaikan.

Melalui gambaran dari realita dan data diatas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan yang ada di Indonesia terjadi karena adanya faktor-faktor dari komponen ekonomi lain yang masih belum ditingkatkan secara maksimal. Adanya keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Indonesia tidak relevan lagi jika hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi saja. Hal ini memberikan dorongan kepada pemerintah Indonesia agar mampu mengkaji lebih dalam akan adanya faktor lain yang dapat menjadi indikator keberhasilan kemiskinan dengan lebih relevan.

UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menyebabkan adanya perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Perubahan mendasar kedalam sistem pemerintahan daerah ini bisa tercermin dengan berlakunya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia adalah dengan menetapkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin melalui komposisi anggaran atau belanja daerah. Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah yang dapat memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dianggarkan. Belanja modal berfungsi sebagai pemicu dan pemelancar terlaksananya pembangunan ekonomi daerah dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat lebih cepat.

Investasi merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Dengan adanya investasi, suatu daerah dapat mengembangkan produk-produk barang dan jasa yang bernilai sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menurunkan angka pengangguran. Terserapnya tenaga kerja pada lapangan pekerjaan di daerah tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sehingga dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, masyarakat sendiri akan mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, perkembangan investasi dapat mengurangi jumlah masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan.

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penyebab tingkat kemiskinan pada masyarakat. kualitas sumber daya ini biasanya di ukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu dengan melihat tinggi rendahnya pendapatan masyarakat, pendidikan (jumlah masyarakat yang buta huruf), dan kesehatan. Rendahnya produktivitas penduduk tersebut dapat menciptakan rendahnya perolehan pendapatan penduduk. Dalam suatu daerah, jika pertumbuhan pendapatan masyarakatnya rendah, maka tidak jarang akan menyebabkan tingginya penduduk miskin didaerah tersebut.

Dari latar belakang diatas, tergambar pentingnya mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Belanja Modal Daerah, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2013. Dengan demikian, maka rumusan masalah yang dikemukakan dapat diwujudkan dalam pertanyaan penelitian (*research question*). Adapun pertanyaan penelitiannya adalah “ Bagaimana belanja modal daerah, investasi dan IPM berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2013?” Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja modal daerah, investasi dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2013.

B. KERANGKA TEORITIS

Dalam teori yang dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave, pengeluaran pemerintah didasarkan pada pandangan mereka melalui pengamatan terhadap pembangunan ekonomi di beberapa Negara. Model ini menghubungkan tahap-tahap pembangunan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah yang terdiri dari tahap awal (penyediaan sarana dan prasarana), tahap menengah (penyediaan barang dan jasa public) dan tahap lanjut (penyediaan prasarana ke aktivitas social). Dalam teori ini, semakin besar pengeluaran pemerintah maka dapat memperlancar kegiatan pada tahap-tahap pembangunan sehingga menurunkan kemiskinan (Fitrianti, 2013).

Sedangkan, menurut pemikiran Rosenstein-Rodan dalam teori Dorongan Kuat (*Big-Push*) nya, untuk mendorong ekonomi kearah kemajuan diperlukan suatu “dorongan kuat” dari investasi atau suatu program besar-besaran yang menyeluruh dalam bentuk suatu jumlah minimum investasi tertentu. Jadi ada sejumlah minimum sumber-sumber produksi dalam jumlah besar yang harus disediakan jika suatu program pembangunan diharapkan berhasil. Teori ini menyatakan bahwa cara kerja atau kegiatan investasi sedikit demi sedikit tidak akan dapat mendorong ekonomi dengan berhasil pada lintasan pembangunan; tetapi suatu jumlah minimum investasi yang besar-besaran merupakan syarat mutlak dalam hal ini (Kamaluddin 83 : 1998). Dengan adanya dorongan

investasi yang semakin besar, maka pembangunan dapat terealisasi dengan cepat dan menurunkan kemiskinan.

Dalam Kuncoro (30:2003) *Human Development Indeks (HDI)* atau dalam istilah bahasa Indonesia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencoba merangking semua Negara dalam skala 0 (sebagai tingkatan pembangunan manusia yang terendah) hingga 1 (pembangunan manusia yang tinggi) berdasarkan atas 3 tujuan atau produk pembangunan, yaitu :

1. Usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup
2. Pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah dewasa yang dapat membaca (diberi bobot dua pertiga) dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga)
3. Penghasilan yang diukur pendapatan perkapita riil yang telah disesuaikan, yaitu disesuaikan menurut daya beli mata uang masing-masing Negara dan asumsi menurunnya utilitas marginal penghasilan dengan cepat.

UNSFIRS (2000) dalam Kuncoro (2003) Indeks tiga komponen IPM tersebut dapat dihitung melalui :

$$HDI = 1/3 \{ X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)} \} \quad (1)$$

Dimana :

$X_{(1)}$ = indeks harapan hidup kelahiran

$X_{(2)}$ = indeks pendidikan = $2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$ (indeks rata-rata lama sekolah)

$X_{(3)}$ = indeks standar hidup layak

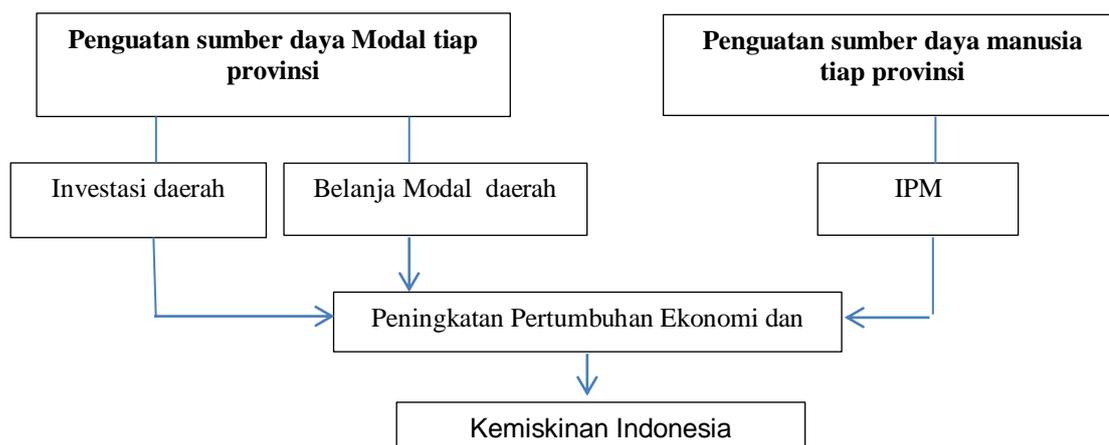
. Peningkatan pembangunan setiap daerah di Indonesia diakumulasikan dalam belanja modal. Dengan adanya belanja modal tersebut, setiap daerah mampu membelanjakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga memberikan eksternalitas pada kegiatan ekonomi daerah. Adanya eksternalitas kegiatan ekonomi daerah ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi kemiskinan sesuai dengan tujuan desentralisasi fiskal setiap daerah. Dalam penelitian Adi Wiyoso (2012) yang berjudul “analisis pengaruh PAD, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur” diperoleh bahwa rasio belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

Peningkatan investasi dapat mengurangi pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja. Peningkatan investasi juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat akan meningkat. Dengan meningkatnya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, akan mengurangi jumlah masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Dengan demikian masyarakat yang berada di garis kemiskinan tadi dapat meningkatkan gizi, pendidikan bagi anak-anak mereka dan dapat menabung untuk masa depan mereka (Adventua, 2012). Dalam jurnal penelitian Junaidi (Vol.1, No.3, 2013) yang berjudul investasi PMA dan PMDN pengaruhnya terhadap perkembangan PDRB dan penyerapan tenaga kerja serta penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Utara, menunjukkan bahwa investasi PMA, PMDN memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kemiskinan.

Dalam Whisnu Adhi (2011) Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Hasil penelitian Whisnu Adhi (2011) menyatakan bahwa IPM berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat melalui bagan berikut ini :

Gambar 3. **Kerangka Pikir**



Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Belanja Modal Daerah berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia
2. Investasi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pembahasan mengacu pada data-data yang diperoleh, yang kemudian dipaparkan secara sistematis dan faktual. Selanjutnya digunakan beberapa metode analisis data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di semua provinsi Indonesia yaitu pada Penelitian ini menggunakan data sekunder dari publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia. Sedangkan jangka waktu data yang digunakan adalah tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.

Di bawah ini adalah definisi operasional dari beberapa variabel dan cara mengukurnya.

Tabel 2. Operasional Variabel Penelitian

No	Notasi	Arti	Cara mengukur
1.	IPM	Indeks pembangunan manusia	$IPM = 1/3 \{ X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)} \}$ $X_{(1)}$ = indeks harapan hidup kelahiran (kesehatan) $X_{(2)}$ = indeks pendidikan $X_{(3)}$ = indeks standar hidup layak (pendapatan)
2.	BMD	Belanja Modal Daerah	Jumlah realisasi belanja modal daerah di 33 provinsi Indonesia
3.	I	Investasi	Jumlah total penanaman modal dalam negeri dan luar negeri 33 provinsi Indonesia.

Sumber : data peneliti, 2015.

Populasi dan Penentuan Sampel

Penelitian ini mengambil populasi seluruh provinsi Indonesia yang berjumlah 33 provinsi. Dalam penelitian ini, semua populasi dijadikan sebagai sampel. Yaitu dengan jumlah sampel adalah 33 provinsi di Indonesia.

Metode Analisis

1. Regresi Data Panel :

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan statistik linear berganda (*Multiple Regression*) untuk data panel. Sehingga model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Log} (TK_{it}) = \alpha + \beta_1 \text{log} (BMD_{it}) + \beta_2 \text{log} (IPM_{it}) + \beta_3 \text{log} (I_{it}) + \varepsilon_{it}$$

Dengan penjelasan :

TK = Tingkat Kemiskinan

α = konstanta

β_k = Elastisitas Variabel ke-k, dengan k=1,2,3,4

i = provinsi ke-I (1,2,...33)

t = tahun pengamatan (2009, 2010, 2011, 2012, 2013)

β_1 = koefisien regresi dari BMD

β_2 = koefisien regresi dari IPM

β_3 = koefisien regresi dari I

IPM = Indeks pembangunan manusia
 BMD = Belanja Modal Daerah
 I = Investasi
 ε_{it} = Kesalahan pengganggu (*Error of term*)

2. *Pemilihan Model :*

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisis data panel. Tahap awal adalah pemilihan model estimasi. Terdapat tiga pendekatan metode yang digunakan dalam menganalisis data panel, yaitu common effect, fixed effect, dan random effect. dalam penelitian ini, hasil uji regresi menunjukkan model fixed effect adalah model yang terbaik untuk digunakan.

3. *Uji Asumsi Klasik :*

pada penelitian ini, komponen uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas semata. Dalam penelitian data panel, tidak semua uji asumsi klasik harus dimasukkan dalam regresi linear berganda dengan pendekatan OLS. Uji lineritas hampir tidak digunakan dalam regresi linear dan jika sekalipun digunakan, maka hal itu hanya berfungsi untuk menentukan seberapa linearnya. Sedangkan uji autokorelasi dalam penelitian data panel juga tidak perlu digunakan. Hal ini karena autokorelasi hanya terjadi pada data time series.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

Di bawah ini adalah hasil pemilihan model regresi data panel dengan uji Hausman pada aplikasi Eviews 6.

Tabel 3. **Hasil Uji Hausman**

Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3304.593253	3	0.0000

Sumber : Data peneliti, 2015. (diolah dengan Eviews 6)

Tabel diatas menunjukkan bahwa probabilitas (p-value) Cross-section Random < signifikan error ($\alpha = 0,050$) sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak. Dengan tertolaknya hipotesis nol (H_0) tersebut, maka model yang lebih baik digunakan adalah *Fixed effect* (FEM).

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Di bawah ini adalah beberapa hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan oleh penulis melalui aplikasi Eviews

Tabel 4. **Hasil Uji Multikolinearitas**

	BMD	I	IPM
BMD	1.000000	0.347653	0.105164
I	0.347653	1.000000	0.692428
IPM	0.105164	0.692428	1.000000

Sumber : Data peneliti, 2015. (diolah dengan Eviews 6)

Berdasarkan tabel diatas, semua nilai korelasi antar variabel menunjukkan lebih kecil dari nilai mutlak 0,8 sehingga tidak terdapat multikolinearitas antar variabel. Atau dengan kata lain multikolineraitas negatif. Hal ini berarti antar variabel independen tidak memiliki korelasi satu sama lain.

Tabel 5. Uji White Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	0.536721	Prob. F(3,23)	0.6618
Obs*R-squared	1.766523	Prob. Chi-Square(3)	0.6222
Scaled explained SS	0.784200	Prob. Chi-Square(3)	0.8532

Sumber : Data peneliti, 2015. (Diolah dengan Eviews 6)

Dengan uji hipotesis berikut ini :

H₀ : Tidak ada heteroskedastisitas

H₁ : Ada Heteroskedastisitas

Maka berdasarkan tabel diatas, hasil yang diperoleh dari uji White Heteroskedastisitas adalah bahwa nilai dari Obs*R-squared sebesar 0.6222 dengan p-value lebih besar dari $\alpha=0.05$ sehingga menerima H₀. Jika menerima H₀ maka data yang diperoleh berarti tidak terdapat heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Kriteria Statistik

Berikut ini adalah hasil pengujian kriteria statistik yang terdiri dari determinasi R², Uji simultan, dan uji statistik parsial.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Data Panel dengan Metode *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.273829	0.000591	5537.990	0.0000
BMD?	-8.353129	3.792961	-2.202271	0.0300
I?	2.878799	1.231329	2.337962	0.0215
IPM?	0.000415	8.921429	4.652301	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.974064	Mean dependent var		3.303304
Adjusted R-squared	0.964608	S.D. dependent var		0.000242
S.E. of regression	4.560812	Akaike info criterion		-16.92597
Sum squared resid	1.996897	Schwarz criterion		-16.13975
Log likelihood	1153.114	Hannan-Quinn criter.		-16.60649
F-statistic	103.0100	Durbin-Watson stat		1.490849
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data peneliti, 2015. (Diolah dengan Eviews 6)

1. Koefisien Determinasi R²:

Dari hasil estimasi diperoleh pada regresi data panel tabel 4.10 nilai R² sebesar 0.97 atau sebesar 97%. Hal ini berarti bahwa dalam model persamaan tersebut variabel independennya yaitu Belanja Modal Daerah (BMD), Investasi (I), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menjelaskan Tingkat Kemiskinan (TK) sebesar 0,97 atau 97% sedangkan sisanya 3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model persamaan lainnya.

2. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) :

Hasil uji signifikansi simultan ini bisa dilihat melalui nilai prob F statistik. Jika nilai prob F statistic < α , maka variabel-variabel independen dalam model secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis uji signifikansi simultan (Uji F) adalah :

H₀ : BMD, I, IPM secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan

H₁ : BMD, I, IPM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

Pada tabel diatas, kita bisa melihat bahwa (p-value) F-statsistik $0,00 < \text{signifikan error } (\alpha = 0,050)$ sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak. Jika H_0 ditolak, maka H_1 diterima, sehingga variabel independen (BMD, I, IPM) secara simultan dapat mempengaruhi variabel dependennya (TK).

3. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t) :

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.273829	0.000591	5537.990	0.0000
BMD?	-8.353129	3.792961	-2.202271	0.0300
I?	2.878799	1.231329	2.337962	0.0215
IPM?	0.000415	8.921429	4.652301	0.0000

Sumber : data peneliti, 2015. (data diolah dengan Eviews 6).

- BMD_{it} atau variabel Belanja Modal Daerah pada provinsi i dan periode t memiliki nilai statistik sebesar -2.202271 dengan prob-value $0.0300 < \alpha = 0,005$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan probabilitas yang lebih kecil dari derajat kepercayaan 0,05 maka variabel BMD_{it} bersifat signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, sedangkan nilai statistik -2.202271 menunjukkan bahwa BMD_{it} memiliki pengaruh negative terhadap Tingkat Kemiskinan (menurunkan kemiskinan).
- I_{it} atau variabel Jumlah Investasi pada provinsi i dan periode t memiliki nilai statistik sebesar 2.337962 dengan prob-value $0.0215 < \alpha = 0,005$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan probabilitas yang lebih kecil dari derajat kepercayaan 0,05 maka variabel I_{it} bersifat signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, sedangkan nilai statistik 2.337962 menunjukkan bahwa I_{it} memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan (menaikkan kemiskinan).
- IPM_{it} atau variabel Indeks Pembangunan Manusia pada provinsi i dan periode t memiliki nilai statistik sebesar 4.652301 dengan prob-value $0,0000 < \alpha = 0,005$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan probabilitas yang lebih kecil dari derajat kepercayaan 0,05 maka variabel IPM_{it} bersifat signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, sedangkan nilai statistik 4.652301 menunjukkan bahwa IPM_{it} memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan (menaikkan kemiskinan).

Pengaruh Belanja Modal Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian Nugroho Adi (2012) yang memperoleh hasil bahwa rasio belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap kemiskinan di kota/kabupaten Jawa Timur. pengaruh signifikan negatif dari belanja modal daerah terhadap tingkat kemiskinan juga berbanding lurus dengan teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave berdasarkan pandangan mereka melalui pengamatan terhadap tahap-tahap pembangunan ekonomi di beberapa negara. Dengan terbukti adanya signifikansi negatif dari belanja modal terhadap kemiskinan pada penelitian ini, maka jelas bahwa belanja modal daerah sendiri terbukti konsisten dengan teori yang ada dalam berperan penting sebagai lokomotif percepatan dan akselerasi pembangunan aktivitas ekonomi masyarakat di setiap provinsi.

Pengaruh Investasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Hasil signifikan dari investasi terhadap kemiskinan dalam penelitian ini sesuai dengan jurnal penelitian Junaidi (Vol.1, No.3, 2013) yang berjudul investasi PMA dan PMDN pengaruhnya terhadap perkembangan PDRB dan penyerapan tenaga kerja serta penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Utara. Hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa investasi PMA, PMDN memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap penurunan jumlah orang miskin di Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil regresi pada penelitian ini juga berbanding terbalik dengan teori Investasi Pengganda (*Multiple effect*) yang dikemukakan oleh Keynes. pengaruh kenaikan investasi ternyata dapat meningkatkan kemiskinan secara signifikan. Dengan demikian hasil penelitian ini tidak konsisten terhadap teori yang ada. Hal ini dikarenakan, kenaikan investasi dalam memberikan pengaruh terhadap penurunan kemiskinan memiliki transmisi yang panjang. Selain

itu, terdapat tingginya proporsi investasi pada sektor industri dibandingkan sektor lain yang menyebabkan meningkatnya penawaran lapangan kerja bagi masyarakat yang berlatar belakang pendidikan tinggi. Hal ini mengakibatkan dapat membatasi penduduk miskin dalam mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik karena tingkat pendidikan mereka rendah.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini tidak sesuai dengan ketiga hasil penelitian terdahulu yaitu dari penelitian Fathul Mufid (2014), jurnal penelitian M.Sri Wahyudi (Vol.8, 2010), dan penelitian Whisnu Adhi (2011). Ketiga penelitian terdahulu tersebut menghasilkan bahwa IPM berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Hal ini juga berbanding terbalik dengan teori yang menyatakan ketika produktivitas pembangunan manusia naik maka seharusnya kemiskinan menurun.

Hal ini dikarenakan adanya program pembangunan pemerintah yang menyangkut tiga indikator indeks pembangunan manusia seperti pembangunan di bidang pendidikan, pembangunan di bidang kesehatan, dan pembangunan di bidang ekonomi masyarakat masih kurang optimal. Belum optimalnya program pembangunan yang mencakup tiga indikator IPM tersebut dapat dirasakan dengan belum banyaknya program pembangunan yang memberikan manfaat secara langsung bagi kaum miskin.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel belanja modal daerah yang merupakan indikator penguatan sumber daya modal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia (pada 33 provinsi). Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave yang menyatakan bahwa tahap-tahap pembangunan negara akan berjalan dengan baik jika dikuatkan dengan pengeluaran pemerintah yang memadai. Tahapan pembangunan tersebut dapat memberikan kesejahteraan yang sesungguhnya (penurunan kemiskinan) pada masyarakat dengan adanya modal pengeluaran pemerintah yang teralokasi dengan baik. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah dalam mengembangkan pembangunan bisa terakumulasi melalui belanja modal di setiap daerah (provinsi).
2. Variabel investasi yang merupakan indikator penguatan sumber daya modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia (pada 33 provinsi). Hal ini tidak sesuai dengan teori teori Investasi Pengganda (Multiple effect) yang dikemukakan oleh Keynes yang menyatakan bahwa kenaikan investasi menyebabkan naiknya pendapatan, dan karena pendapatan meningkat, muncul permintaan yang lebih banyak atas barang konsumsi, yang pada akhirnya menyebabkan kenaikan berikutnya pada pendapatan dan pekerjaan. Dengan adanya kenaikan pendapatan dan bertambahnya pekerjaan masyarakat, maka jumlah penduduk miskin akan menurun. Dengan adanya pengaruh signifikan positif dari investasi terhadap tingkat kemiskinan, maka Hal ini membuktikan bahwa, kenaikan investasi mungkin memang mampu menaikkan angka pendapatan nasional dan PDB Indonesia, namun tidak secara langsung dapat menurunkan kemiskinan.
3. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator penguatan sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia (pada 33 provinsi). Hal ini bertolak belakang dengan teori pembangunan manusia dimana ketika produktivitas masyarakat meningkat maka kemiskinan menurun. Dengan hal ini, maka pemerintah perlu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia terutama dalam sisi produktifitas setiap provinsi. Peningkatan IPM tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kebijakan khusus yang menunjang peningkatan indikator penyusun IPM (pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat).

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh belanja modal daerah, investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kemiskinan di setiap provinsi di Indonesia, maka terdapat beberapa saran yang bisa disampaikan sebagai berikut :

1. Pemerintah provinsi di Indonesia perlu lebih konsisten dalam meningkatkan kebijakan alokasi anggaran yang lebih baik dan ketat terhadap pengeluaran untuk belanja modal daerah dengan sesuai pada waktu dan kondisi di provinsi tersebut. Selanjutnya, anggaran belanja modal daerah yang telah ada, dapat digunakan secara lebih optimal dan merata pada setiap penduduk tanpa terkecuali baik dalam jangka panjang dan jangka pendek. Sehingga dengan demikian, kemiskinan yang ada di setiap provinsi menurun.
2. Pemerintah provinsi disarankan untuk tidak hanya menarik investor sebesar-besarnya dalam melakukan penanaman modal, namun juga memperhatikan kualitas dan proporsi investasi tersebut agar tidak terjadi penumpukan investasi pada sektor tertentu saja sehingga tidak ada ketimpangan dana investasi antara sektor publik dan sektor swasta. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap dana investasi yang disalurkan agar dana tersebut dapat mencapai sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan termasuk orang miskin. Sehingga dengan demikian, kemiskinan yang terjadi pada masyarakat dapat menurun.
3. Pemerintah provinsi seharusnya lebih memperhatikan kualitas sumber daya manusia dengan adanya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sudah diterapkan di Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu untuk meningkatkan kebijakan atau program pembangunan pemberantas kemiskinan yang mencakup tiga indikator IPM (pendidikan, kesehatan, dan pendapatan) secara optimal. berdasarkan penelitian, investasi utama dalam sumber daya manusia adalah pendidikan dimana dengan pendidikan tersebut masyarakat dapat berkembang, memiliki penghasilan tinggi, dan berfikir maju. Oleh karena itu, saran terbaik dari penelitian ini adalah pemerintah perlu meningkatkan sektor pendidikan melalui pemberian biaya gratis kepada siswa tidak mampu, peningkatan standart kualitas guru melalui insentif bagi guru berprestasi, peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi secara informal, dan program pemberantasan buta huruf.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Wiyoso, Nugroho. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. Skripsi tidak diterbitkan. Malang : Program Sarjana UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG.
- Adventua Silalahi, Donny. 2012. Analisis Pengaruh Pdrb (Produk Domestik Regional Bruto), Tingkat Investasi dan Tingkat Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Utara. Skripsi diterbitkan. Medan : Program Sarjana UNIVERSITAS SUMATRA UTARA MEDAN.
- Adhio Saputra, Whisnu Adhi. 2011. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten / Kota Jawa Tengah. Skripsi diterbitkan. Semarang : Program Sarjana UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Data dan Informasi Kemiskinan, Realisasi Penanaman Modal PMDN dan PMA, IPM 2009-2013*. Jakarta : Badan Pusat Statistik Indonesia. [Online] Tersedia : <http://www.bps.go.id/>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2015.
- Cholili, Fatkhul Mufid. 2014. Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia). Skripsi tidak diterbitkan. Malang : Program Sarjana UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG.
- Kamaluddin, Rustian. 1998. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomika Pembangunan*. Jakarta : Erlangga.
- Worldbank. 2014. *SIARAN PERS : Penurunan Kemiskinan di Indonesia Melambat, Ketimpangan Meningkat*. [Online] Tersedia : <http://www.worldbank.org/in/news/press->

[release/2014/09/23/poverty-reduction-slows-inequality-increases-world-bank-reports/](http://www.worldbank.org/press/2014/09/23/poverty-reduction-slows-inequality-increases-world-bank-reports/).

Diakses pada : 12 Januari 2015.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus penulis sampaikan kepada Dosen pembimbing, Dosen penguji, dan teman-teman jurusan Ilmu Ekonomi sehingga memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.